
**DELEMATIKA PERUBAHAN KURIKULUM DI TENGAH GELOMBANG
OTONOMI DAERAH PADA BIDANG PENDIDIKAN**

Oleh : **Anita Trisiana**

**BELEMATIKA PERUBAHAN KURIKULUM DI TENGAH GELOMBANG
OTONOMI DAERAH PADA BIDANG PENDIDIKAN**

Olaha Anita Trisiana

Abstrak: Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one time efforts to transform decisions into operational form , as well as continuing efforts to achieve the large and small change mandated by policy decisions.

The Result of the implementation governmental policy in Indonesian have been executed by all School. The problem faced by each School in Indonesian is still lower the understanding to curriculum 2004, and still limited fund and also medium and equipment supporting curriculum execution 2004. The strategy that done by a school to face the problem of About Curriculum Execution 2004 was by improving educator professionalism (*learn*) through seminar activity, work shop, training have local and national scale and other and also prepare the medium and equipment supporter by self- fund.

Kata Kunci: Perubahan Kurikulum, Otonomi Daerah, Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa, sebagaimana diatur dalam amandemen ke empat UUD 1945 Pasal 31, sehingga pendidikan harus mampu memfasilitasi perubahan demi terwujudnya pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Pada saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol seperti yang dikemukakan Yahya A. Mahasin yang dikutip dalam sambutan menteri pendidikan nasional, yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi

dikalangan akademisi dan kemandirian.

Sebagai antisipasi terhadap permasalahan tersebut, maka secara menyeluruh perlu kiranya dibangun jalinan kerjasama yang lebih kokoh dan lebih terarah antara pejabat pemerintah di bidang pendidikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar usaha mencari jalan keluar berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan secara bersama – sama. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka perlu tercipta suatu mekanisme yang harmonis di antara para “ *stakeholders* ” pendidikan. Pada tingkat pusat hubungan tersebut diperkuat antara Departemen dan kementerian Negara yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu dalam menanggapi berbagai kebijakan yang menjadi kewenangan masing – masing ditingkat pusat , sedangkan ditingkat provinsi dan kabupaten / kota diperkuat



pada pilihan kerjasama antara pihak eksekutif , legislatif , dan wakil dan masyarakat sebagai pelaksana berbagai kebijakan dari pemerintah.

Peraturan perundang – undangan yang baru tentang otonomi daerah telah membawa implikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum antara lain pembaharuan dan diversifikasi kurikulum, antisipasi keadaan masa depan dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi yang multidimensional.

Kurikulum 2004 yang berisi Kurikulum Berbasis Kompetensi dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian berbasis hidup dalam perubahan, persaingan , kemandirian, dan keragaman – keragaman dalam kehidupan. Kurikulum Berbasis Kompetensi bertujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan cerdas dalam menantang identitas budaya bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta mewujudkan karakter nasional.

Upaya penyempurnaan kurikulum itu guna mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya , yakni aspek – aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan , keterampilan, kesehatan , seni dan budaya. Pengembangan aspek – aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakupan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi

peserta didik untuk menjalani hidup serta menyesuaikan diri dan berhasil dalam kehidupan. Kurikulum ini dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah dan sekolah.

Dalam rangka melakukan pembaharuan sistem pendidikan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional sedang mel akukan penyempurnaan kurikulum nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang akan diberlakukan pada tahun-tahun mendatang. Upaya penyempurnaan kurikulum ini merupakan respon atas berbagai kritik dan tanggapan terhadap konsep dan implementasi kurikulum 1984, 1994, dan 2004 yang dianggap memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun pendekatan dan organisasi kurikulum.

Namun kebijakan mengenai pelaksanaan kurikulum 2004 sampai saat ini hanya berupa draft kurikulum yang belum ditandatangani oleh Mendiknas. Oleh karena itu jika dilihat dari segi hukum, maka dapat dikatakan belum ada payung hukum yang " jelas ", karena sampai saat ini belum dikeluarkannya Keputusan Mendiknas mengenai pelaksanaan kurikulum tersebut. Sehingga pemerintah melalui Pusat Kurikulum (Pusku) dan Depdiknas berusaha mensosialisasikan pemberlakuan kurikulum 2004 yang diralat lanjut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Sekolah (KTSP 2006) secara nasional melalui pemerintah daerah setempat. Gambaran umum tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan di berbagai daerah hingga saat ini masih sangat minim diadakan penelitian / evaluasi sebagai " pendampingan " atau

pelaksanaan otonomi yang menyangkut berbagai masalah pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Tulisan ini berkecenderungan membahas lebih lanjut bagaimana dilakukan perubahan kurikulum sebagai bagian dari kebijakan pemerintah terutama pengaruhnya pada pelaksanaan otonomi daerah pada bidang pendidikan. Dengan harapan perubahan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan perdebatan dalam dunia pendidikan dan perspektif kebijakan publik khususnya mengenai implementasi kebijakan otonomi daerah sebagai pemicu dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

DILEMATIKA PERUBAHAN KURIKULUM

Di tengah hiruk pikuknya berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terdapat kaum lain yang terdita dari kelompok masyarakat adalah perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut tampak dari tahun ketahun, seperti pada Kurikulum tahun 1984 (CBSA) dengan penambahan suplemen pada kurikulum tersebut pada tahun 1994, kemudian keinginan yang terus menerus untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia sehingga memungkinkan kembali perubahan kurikulum dilakukan dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK (2004).

Lalu, bagaimana sebenarnya perubahan kurikulum yang selalu membuat masyarakat kebingungan?, ada apa dibalik perubahan itu?, apakah perubahan itu menghasilkan pendidikan itu yang berkualitas? Mungkin pilihan pertanyaan yang muncul dari

perlu tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah ini membawa perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah adanya gelombang otonomi daerah yang tetap berimbas langsung maupun tidak langsung terhadap bidang pendidikan.

Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai, melainkan mengombinasikan nilai yang jauh lebih besar. Misalnya pendidikan juga mempersiapkan generasi penerus dengan akhlak, moral, dan kepribadian yang baik; pendidikan juga bertanggungjawab atas karakter janda sebagai bangsa, dunia pendidikan; terutama pendidikan tinggi juga diharapkan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Kebijakan dasar dalam kaitannya dengan isu relevansi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Penanaman wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Empat pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO (1996) yaitu bahwa pendidikan harus memungkinkan dan membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar mengetahui (*learning to know*), belajar bekerja atau mengerjakan sesuatu (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*).

- 2) Pendidikan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi.

Mempersiapkan tenaga kerja yang bermutu dengan kemampuan yang



sesuai dengan arah perubahan struktur ekonomi merupakan bagian dari raga pendidikan nasional. Oleh karena itu diperlukan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, sehingga dihasilkan tenaga kerja dengan koreposisi dan struktur keahlian yang sedekat mungkin dengan kebutuhan dan peluang yang tersedia di pasar kerja pada tingkat lokal, nasional, dan bahkan regional dan internasional.

- 3) Program visioner untuk mencapai keunggulan dan perkembangan (p.k)
- 4) Pendidikan moral dan karakter kebangsaan
- 5) Penekanan pendidikan dan keajahteraan masyarakat.

Baeyens, dkk (2001: 85 - 88)

Dalam setiap reformasi pendidikan selalu terjadi perubahan - perubahan kecil di dalam materi pembelajaran. Perubahan

biarinya terjadi dalam hal urutan, bisa juga terjadi penambahan dan pengurangan materi. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, perubahan yang terjadi ada dalam beberapa mata pelajaran. Namun dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi guru - guru juga masih menuntai hal - hal yang sama, karena materi pada hakekatnya sama namun ada pengurangan terhadap materi - materi yang jumlahnya terlalu padat.

Kurikulum sebelumnya bertujuan memberitahukan kepada para pelaksana pendidikan, terutama guru tentang apa yang harus mereka ajarkan. Kurikulum Berbasis Kompetensi juga memberitahukan kepada para guru tentang apa yang harus mereka ajarkan, namun hal itu berlaku pada penggambaran tentang apa yang harus dikuasai siswa sebagai hasil belajarnya. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan mengenai perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004, yaitu sebagai berikut:

PERBEDAAN KURIKULUM 1994 DENGAN KURIKULUM 2004

No	ASPEK	KURIKULUM	
		1994	2004
1.	Filosofi	Struktur keilmuan.	Kompetensi lulusan
2.	Tujuan	Agar siswa menguasai materi pelajaran seperti yang tercantum dalam silabus.	Agar siswa memiliki semua kompetensi dasar untuk semua mata pelajaran.
3.	Sablonasi mata pelajaran	Dicotakan pemerintah dalam GBPP (Garis - garis Besar Pokok Pengajaran).	Dicotakan sepenuhnya oleh sekolah, pemerintah hanya menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian dan materi pokok saja.



4.	Cara pembelajaran	Cenderung klasikal dengan tujuan untuk menguasai materi pembelajaran.	Guru berfungsi sebagai fasilitator sehingga harus memperhatikan kecepatan belajar siswa secara individual.
5.	Cara penilaian	Acuan norma, yang variabelnya adalah ketuntasan kognitif siswa.	Acuan kriteria, yang variabelnya adalah waktu.

Dalam terbitan konsep kurikulum 2004 disebut juga sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi dikembangkan dari konsep pendidikan berbasis kompetensi yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan.

KBK yang mengabdikan dan berorientasi kepada pemilikan *life skill* yang handal (Fazwa, 2006). KBK dianggap belum menghasilkan keterampilan peserta didik yang mencapai tujuan 65% para guru masih menyajikan pola pembelajaran dengan *teacher center*. Kondisi seperti itu kembali para pakar pendidikan Indonesia memperbaiki dan melakukan perubahan serta kembali mempelajari kelemahan kurikulum sebelumnya dan menggantinya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Sekolah (KTSP) 2006.

Kita lihat, perubahan-demi-perubahan yang terjadi kurikulum pendidikan maka semakin baik pola perkembangan pendidikan. Posisi ini merupakan sebuah pola pengembangan yang berhasil. Amerika Serikat telah berhasil melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi secara signifikan, keberhasilan

tersebut juga dicontoh oleh banyak Negara termasuk Indonesia (Sujono, 2005) akan tetapi malah sebaliknya Indonesia menggantinya dengan Kurikulum Tingkat satuan Sekolah (Oemar H, 2006). Posisi optimis implementasi KTSP 2006 akan berhasil kalau SDM nya mampu berbuat sebanyak mungkin untuk mengembangkan mutu pendidikan Indonesia.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya upaya pembagian kewenangan dalam berbagai bidang pemerintahan termasuk didalamnya pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini menurut Unggul Sedarmo, dalam makalah yang disampaikan dalam seminar sosialisasi Kurikulum 2004 ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- 1) Diversifikasi kurikulum, yang merupakan proses penyusutan, perluasan, pendalaman materi pembelajaran agar dapat melayani keberagaman.
- 2) Penetapan standar kemampuan, dengan maksud untuk menetapkan ukuran minimal yang mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang harus dicapai dan diketahui, dikuasai, dan dirubuhkan oleh peserta didik pada setiap jenjang sebagai upaya kendali dan jaminan kualitas.

- 5) Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membudayakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi daerah bersangkutan.

Sebagai respon atas ketiga hal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah merumuskan standar nasional untuk seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan menengah, yang mencakup kompetensi – kompetensi sebagai berikut:

- 1) Standar Kompetensi peserta didik, yaitu ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mampu dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dan materi yang diajarkan.
- 2) Kompetensi Dasar yang merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Setiap standar kompetensi dijabarkan dalam beberapa kompetensi dasar yang lingkungannya lebih sempit.
- 3) Standar Materi Pokok yang merupakan materi esensial dalam suatu mata pelajaran yang dapat berupa bidang ajar, gagasan isi, tema, proses, keterampilan, atau konteks keilmuan suatu mata pelajaran.
- 4) Indikator Pencapaian, merupakan indikator yang dijadikan sebagai ukuran untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran.

Implementasi Otonomi Daerah pada Bidang Pendidikan

Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, pendidikan pun menaruh etnometri sebagai dasarnya. Hal ini harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Menurut Gunawan dan Tjep Dahyat (2002: 41) bahwa prinsip pendidikan nasional dijabarkan dalam empat strategi kebijakan dasar yaitu: pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Perubahan pendidikan dari sentralisasi menuju desentralisasi akan menyebab terjadinya perbedaan dalam hal kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan oleh keragaman potensi sumberdaya yang dimiliki daerah. Daerah yang surplus seperti Riau, ada kemungkinan akan melesit, karena surplus dana yang kuat. Sedangkan, Riau sudah bisa memberikan tunjangan fungsional yang cukup besar kepada guru. Hal ini bisa memarah gairah guru dalam PBM yang berdampak meningkatnya mutu pendidikan. Sebaliknya, ada daerah minus yang tidak bisa memaklakan tunjangan fungsional guru dan tidak adanya peningkatan sarana belajar. Perbedaan ini, bisa mengakibatkan beragamnya hasil belajar. Untuk itulah diperlukan standar mutu, baik global yang harus diatur dalam suatu sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan harus tetap mengacu kepada standar pendidikan secara nasional dan global.

Ini dari pemerataan pendidikan



adalah demokrasi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan keadaan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, lokasi geografis.

Perubahan dari pendidikan yang terpusat menuju otonomi daerah tidak serta merta mengubah kurikulum nasional. Kurikulum nasional tetap sebagai *one size one* (Prof. H.A. Kosasih Djahiri, 2002). Kurikulum nasional menjadi standar dalam menamakan kompetensi siswa. Oleh karena itu isi program dasar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keserasian sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart (Budi Winarno, 2002:101) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan alat administrasi dimana dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjabarkan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, sedangkan implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, kelakuan / *output* / maupun sebagai hasil.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 : 102) membahas Implementasi kebijakan “ sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber – sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan, organisasi/organisasi, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini kita lihat berbagai Model Proses Implementasi Kebijakan antara lain:

1). Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 : 111) menawarkan suatu model proses Implementasi Kebijakan yang mempunyai enam Variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaiannya (*performance*). Variabel – variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut –

a). Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang memengaruhi pencapaian kebijakan. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna di dalam mengartikan tujuan – tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu Ukuran

- ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan hal-hal ini sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam keberapaakasan.

b). Sumber – sumber kebijakan

Sumber – sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan

Sumber – sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan mempercepat implementasi yang efektif.

c). Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi – organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan – pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyempatkan atau menyebatkanannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

d). Karakteristik badan – badan pelaksana

Karakteristik badan – badan administratif berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik peterebel maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

e). Kondisi – kondisi ekonomi , sosial dan politik

Kondisi – kondisi ekonomi , sosial

dan politik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasi pengaruh variabel – variabel lingkungan dari hasil – hasil kebijakan.

f). Kecendrungan pelaksanaan (*implementation*)

Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebijakan itu sendiri, seperti: kognisi (komprohensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

2). Serangkaian menurut Edwards (Budi Winarno, 2000 : 114) studi implementasi kebijakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

a. Kamunikasi

Secara umum proses komunikasi kebijakan terdiri dari:

1). Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan , maka ia harus menyadari bahwa keputusan dan perintah untuk pelaksanaannya telah dibuat dan diketahui, sehingga hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan perintah dapat ditekan sekecil mungkin. Hambatan – hambatan tersebut antara lain:

(a) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh

pengambil kebijakan.

- (b) Informasi melewati belahap – lapis dalam birokrasi.
- (c) Pada akhirnya penangguhan komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui penyampaian – penyampaian suatu kebijakan.

2). Kejelasan

Jika kebijakan – kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petugas pelaksana tidak hanya harus diinstruksikan oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga harus disesuaikan secara jelas.

3). Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berjalan secara efektif, maka perintah – perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber – sumber

Sumber – sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang meliputi: Staf yang memadai serta keahlian – keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan untuk memperlakukan insi – insi dalam kaitan dengan pelaksanaan pelayanan – pelayanan publik.

c. Kecondrungan – kecondrungan

Jika pelaksana kebijakan berdaya baik terhadap suatu kebijakan tertentu maka proses pelaksanaan kebijakan

menjadi semakin mudah.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan merupakan pelaksanaan kebijakan.

Ada beberapa karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (Ibad Winarno, 2002: 148) yaitu:

- 1). Birokrasi dimanapun berada dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk masalah yang definitif sebagai urusan publik.
- 2). Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda untuk masing – masing tahap.
- 3). Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4). Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks.
- 5). Birokrasi jarang mati, namun untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi.
- 6). Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan – pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan – kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka daerah memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sering dengan ini maka dalam bidang pendidikan pun mengalami perubahan. Pendidikan pun memiliki otonomi tersendiri. Sekolah diberi wewenang pula untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara

lebih luas. Hal ini diharapkan, agar sekolah dapat berkembang lebih baik, dan menghasilkan *our pot* yang lebih berkualitas dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Menurut Sidi (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dan pemecatan pelayanan pendidikan. Konsep hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal, normal (*average*), dan unggul.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan

level operasional melalui Komite (*divisi*) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Pitan komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi program/kerja sekolah.

4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemecatan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, dan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan global pada persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, maka pemecatan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis (*democortie education*). Hal tersebut harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis (*democratic interaction*), agar terjadi proses belajar yang menyenangkan (*joyful learning*).

Dengan iklim yang demikian, pendidikan diharapkan mampu melahirkan

calan penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap muka pencipta.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, dan tidak mampu lagi membekalkan bekal, serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa lain di dunia. Perubahan yang mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum, yang sendirinya memuat dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen pendidikan lain.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*), yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab tantangan era globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, serta, dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien dan berhasil guna.

PENUTUP

Perubahan kurikulum dari tahun ke tahun paralel dengan diterapkannya otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi pendidikan tersebut dilakukan di tingkat kabupaten dan kota, serta pendekatan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) dan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Dengan demikian, hendaknya dipahami lebih jauh kodopon yang tidak hanya sekedar penyusunan substansi materi dan format kurikulum dengan tuntutan perkembangan, tetapi pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari pendekatan pendidikan yang berorientasi masukan (*input-oriented education*) ke pendekatan pendidikan berorientasi hasil atau standard (*outcome-based education*).

Memang benar bahwa perubahan kurikulum itu selalu mengandung Gejolak baik di tingkat sekolah maupun pada tingkat orang tua. Dengan berubahnya kurikulum maka para pendidik harus menyesuaikan wawasannya dengan kurikulum baru, harus mempelajari kembali pengemasannya dalam kegiatan instruksional dan selanjutnya diikuti oleh buku-buku paket. Bagi orang tua, perubahan kurikulum sering diderikan dengan penambahan biaya sarana yang berkaitan dengan buku pelajaran baru karena buku yang lama tak terpakai lagi.

Selain permasalahan yang muncul dalam perubahan kurikulum, sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah, perlu diantisipasi dengan mekanisme kebijakan publik yang baik dengan mengacu berbagai faktor sebagai



Berikut:

- 1) Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a) Untuk mengurangi beban Penda, perlu peminjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada kabupaten kota sesuai dengan *manulatio ability* dan kapasitas yang dimiliki;

- b) Perlu melibatkan masyarakat lebih banyak dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan agar layanan pendidikan lebih baik dan sesuai;

- c) Perlu melakukan program aksi sebagai tindak lanjut, mis. Peningkatan SDM, penataan struktur organisasi & manajemen, dukungan anggaran, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmad, 1991. *Huru Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amin Ibrahim, 2004. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Bandung: Mandar Maja
- Anonim, 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- _____, 2002. *Pengembangan Kurikulum & Sistem Pengujian Berbasis Kompetensi*, Depdiknas-Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
- _____, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas
- _____, 2003. *Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas
- Budi Winarno, 2002. *Tesis dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pustaka
- Ely Saandi & Sobrin Mafur, et al, 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah (Kebijakan Evaluasi dan Sasaran)*. Yogyakarta: UII Press
- Lutfi Warsidi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama
- Harwang AJ, 1990. *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: DIKTI
- H.A.R Tilan, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hesri Nogi S Tanggabi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Memahami (Konsep, Strategi dan Kasus)*. Yogyakarta: Laksana Offset
- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sidi, Indra Djati. 2000. *Kebijakan Penyelenggaraan otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*. Dalam makalah seminar. Bandung: Universitas pendidikan Indonesia
- Tilan, H.A.R. 2000. *Panalgsia Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

